



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD HAZAIRIN
2. Jabatan : KEPALA UNIT
3. NHK : 443279

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/160 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 20750 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, WARISAN Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 9216 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, WARISAN Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, WARISAN Rp. 125.000.000
5. Tanah Seluas 273 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, WARISAN Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 116.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2007, LAINNYA Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 97.875.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 433.596.270

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.247.471.270



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.247.471.270

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.